



Batasi Mobilitas Orang

PEMKOT Yogyakarta terus menggecarkan operasi terhadap pelaku perjalanan nonesensial, selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho mengatakan, dalam operasi yang digelar secara acak tersebut, pelaku perjalanan diwajibkan menunjukkan keterangan sehat maupun kartu vaksin. "Kita tidak sekadar melihat kartu vaksin saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan QR Code yang tertera, ya, untuk kepastian," katanya, Selasa (13/7).

Jajarannya sudah menindak beberapa pelaku perjalanan yang tidak menaati aturan PPKM Darurat. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan pelaku perjalanan dari luar DIY. "Kami minta putar balik, karena mereka tidak melengkapi dirinya dengan surat-surat yang diwajibkan, seperti kartu vaksin, atau hasil test antigen," katanya.

"Ada yang pelat (kendaraan)

an) Jawa Tengah, Jakarta, kebanyakan, mereka hanya mau mampir saja di Kota Yogyakarta. Tapi, karena tak ada kepentingan esensial, maka dengan segala hormat kami mohon untuk tidak masuk," lanjut Agus.

Ia pun memastikan, penyebaran di Malioboro, Jalan Solo, simpang Jetis, dan Wirobrajan masih bergulir. Sama halnya dengan penyebaran di *ringroad* Jalan Imogiri Barat, serta Jalan Parangtritis bersama Dishub Bantul.

"Masyarakat yang mau beraktivitas, untuk kepentingan esensial atau kritikal, tetap bisa masuk. Tapi, tidak dapat langsung menyentuh tengah kota, jadi harus lewat di pinggir," pungkas Kadishub.

Langkah kunci

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kapasitas rumah sakit (RS) sebesar apa pun tidak akan cukup apabila orang yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Ia menegaskan, pembatasan mobilitas

penduduk di sisi hulu merupakan kunci untuk menekan laju penularan Covid-19 agar tidak membenani kerja rumah sakit di sisi hilir.

"Selama kegiatan di hulu, tidak dibatasi, mobilitasnya tidak direm, pergerakannya tidak dikurangi, seberapa pun kita tambah kapasitas rumah sakitnya, dokternya, obatnya, oksigennya, enggak akan pernah cukup," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7).

Budi menjelaskan, dari total sekitar 400.000 tempat tidur yang tersebar se-Indonesia, pemerintah telah mengalokasikan 30 persen atau sekitar 120.000 tempat tidur khusus untuk pasien Covid-19. Ia memaparkan, jumlah tempat tidur khusus pasien Covid-19 yang telah terisi melonjak drastis dari sekitar 23.000 tempat tidur sebelum Lebaran menjadi sekitar 90.000 tempat tidur.

"Sebelum Lebaran, kalau Bapak Ibu lihat, yang diisi cuma 23.000, jadi kita masih punya *room* cukup ba-

nyak. Akan tetapi, dalam enam sampai tujuh minggu terakhir, angka 23.000 itu sekarang sudah naik ke 90.000," ujar Budi.

Sementara itu, demi mempersempit kerumunan, pasukan polisi pamong praja itu harus adu argumen dengan masyarakat yang ketubuhan pekerja harian. "Kalau perlawanan keras tidak ada. Cuma kalau adu argumen, ya, kami sering. Biasanya sama pekerja harian, kalau ditertibkan bilangannya dia pekerja harian, kalau sehari enggak kerja enggak bisa makan," jelas Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad.

Sejak PPKM Darurat diberlakukan, total sudah ada 634 tempat usaha yang ditutup paksa oleh Satpol PP DIY. Sementara tempat usaha kuliner yang *ngeyel* tetap buka dan melayani makan di tempat mendapat ganjaran pengegelan sebanyak 32 tempat usaha. Pelanggaran lain yang ditemui yakni masih banyak toko kelontong yang tetap buka melebihi pukul 20.00 WIB. (aka/kpc/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Perhubungan 3. BPBD 4. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005